

Judul : Minta usut tuntas skandal beras oplosan, senayan dukung Presiden bersihkan mafia pangan
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Minta Usut Tuntas Skandal Beras Oplosan Senayan Dukung Presiden Bersihkan Mafia Pangan

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menertibkan peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat mendapat dukungan Senayan. Hal itu sebagai bukti nyata komitmen Presiden membersihkan distribusi pangan dari praktik mafia.

ANGGOTA Komisi IV DPR Hindun Anisah mengatakan, skandal beras oplosan sangat jelas merugikan petani dan konsumen. Kasus ini mesti diusut tuntas dan Pemerintah menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi konsumen.

"Langkah ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh pihak," ujar Hindun di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7) malam. Pertemuan itu membahas pelanggaran standar mutu beras medium dan premium.

Prabowo memberikan arahan agar penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Tak lama kemudian, Bareskrim

Mahe Polri dan Satgas Pangan Polri menetapkan tiga karyawan produsen beras PT FS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras pada Jumat (1/8/2025).

Menurut Hindun, praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas terhadap para pelaku kejahatan pangan ini.

"Siapa pun yang terlibat dalam praktik beras oplosan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegas politikus PKB ini.

Dia meminta jangan diberi ruang bagi mafia pangan yang merusak kesejahteraan petani dan merugikan rakyat kecil. Apalagi, praktik mafia pangan sudah sangat lama merugikan masyarakat.

Selain itu, Hindun mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog memperkuat pengawasan distribusi beras di seluruh



Hindun Anisah

wilayah Indonesia agar kasus serupa tidak terus terulang. Sebab, masyarakat butuh sistem distribusi pangan yang transparan dan akuntabel.

Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak upaya Pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Langkah pemberantasan pelaku beras oplosan menjadi awal dari penataan serius sektor pangan nasional yang lebih adil, bersih, dan berpihak kepada rakyat.

Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum prihatin atas banyaknya temuan kasus pengoplosan beras premium di

berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Praktik ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Sarifah menyoroti temuan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri yang mengungkap 212 merek beras bermasalah. Rinciannya, 136 premium dan 76 medium yang beredar di pasaran.

Data ini menunjukkan 85,56 persen beras premium dan 88,24 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu. Sebanyak 95,12 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat kemasan tidak sesuai klaim.

"Mengemas beras kualitas rendah sebagai produk premium adalah penipuan yang harus dihentikan karena sudah menyangkut hak konsumen yang dijamin undang-undang," tegas Sarifah.

Dia memperkirakan, praktik ini berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun. Rinciannya, Rp 34,21 triliun untuk beras premium dan Rp 65,14 triliun untuk beras medium.

Untuk itu, Sarifah mendesak Pemerintah bertindak tegas. Tidak hanya melalui pengawasan administratif, tapi juga penindakan nyata terhadap produsen

nakal.

"Kemendag harus evaluasi izin perdagangan pelaku. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional," tandas politikus Golkar ini.

Komisi VI DPR, lanjutnya, merekomendasikan empat langkah strategis dalam upaya memberantas beras oplosan. Yaitu, evaluasi izin produsen pelanggar, pemberian sanksi tegas (administratif hingga pidana), digitalisasi pengawasan mutu beras via QR Code, dan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perumusan kebijakan pengawasan pangan.

Dia menegaskan, distribusi pangan harus direformasi agar rakyat dapat produk berkualitas dengan harga wajar. Jangan sampai mereka dirugikan dua kali yaitu kualitas dan harga. "Ini momentum perbaikan total," tandasnya.

Dengan langkah konkret ini, Sarifah berharap praktik kecurangan dalam distribusi beras dapat diberantas sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional.

"Harus ada langkah tegas dari pihak-pihak berwenang agar kepercayaan masyarakat terhadap konsumsi beras premium kembali pulih," kata dia. ■ TF